BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu implementasinya adalah kebijakan desentralisasi fiskal yang berdampak pada pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan aset milik pemerintah daerah (Priyono, Fatimah, and Nurcahya 2020). Penerapan sistem ini selaras dengan prinsip-prinsip *good governance* yang sesuai dengan literatur dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kemandirian daerah, transparansi, akuntabilitas publik, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan masyarakat.

Dalam sistem keuangan daerah, pengelolaan aset memiliki peran penting karena aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010). Aset milik daerah seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendukung jalannya pemerintahan serta berpotensi sebagai sumber pendapatan daerah jika

dikelola secara optimal. Pengelolaan aset yang baik akan menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik.

Optimalisasi pengelolaan aset daerah tidak hanya bertujuan untuk menambah nilai kekayaan daerah, tetapi juga sebagai salah satu langkah untuk dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dikelola secara efektif berpotensi menjadi beban anggaran karena memerlukan biaya pemeliharaan tanpa memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Oleh karena itu, pengelolaan aset yang baik, efisien, dan sesuai prinsip *good governance* menjadi suatu keharusan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan (Soleh&Heru, 2020)

Kabupaten Indramayu sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat memiliki potensi ekonomi cukup besar di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Potensi ini dapat menjadi sumber daya penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah jika didukung dengan pengelolaan aset daerah yang optimal. Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berperan dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.

Salah satu program unggulan dalam pengelolaan aset di Kabupaten Indramayu adalah Lacak Aset Daerah (La-Da) yang berhasil menyelamatkan dan menertibkan berbagai aset daerah karena program lacak daerah ini merupakan salah satu jalan untuk mencari, mendokumentasikan, sekaligus menertibkan berbagai aset yang tersebar di berbagai perangkat daerah, kecamatan dan desa bahkan yang tersebar diberbagai wilayah yang selama ini tidak terdeteksi. Tercatat sejak 2021 hingga 2023, BKAD Kabupaten Indramayu telah berhasil mensertifikatkan 467 bidang tanah senilai Rp202,4 miliar.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan aset tidak termanfaatkan secara optimal atau *aset idle* di Kabupaten Indramayu masih menjadi isu penting dalam pengelolaan aset daerah. Aset-aset tersebut terdiri dari barang milik daerah berupa tanah, bangunan, maupun peralatan dan mesin yang keberadaannya belum dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan, pelayanan publik, maupun kepentingan umum lainnya. Keberadaan aset idle ini berpotensi menjadi beban keuangan daerah karena tetap memerlukan biaya perawatan, pengamanan, serta berisiko kehilangan nilai ekonomis jika dibiarkan terlalu lama tanpa pemanfaatan.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi tersebut, peneliti melakukan telaah terhadap Laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2023, data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022–

2023, serta capaian Program La-Da Tahun 2021–2023. Hasil telaah tersebut menunjukkan adanya ketimpangan cukup besar antara nilai total aset tetap daerah dengan nilai aset yang telah disertifikasi atau dimanfaatkan secara optimal. Berikut disajikan tabel mengenai rekapitulasi nilai aset tetap, aset yang disertifikasi, estimasi nilai aset potensial *idle*, serta realisasi hasil penjualan aset daerah dalam dua tahun terakhir.

Tabel 1. 1Rekapitulasi Aset Tetap dan Aset Tidak Termanfaatkan Kabupaten Indramayu Tahun 2021–2023

No	Uraian	Nilai (Rp)	Presentase (%)	Keterangan
1.	Total Aset Tetap Daerah (2023)	5.370.000.000.000	100%	Berdasarkan Neraca 2023
2.	Aset Tetap yang Disertifikasi (2021–2023)	202.400.000.000	3,77%	Melalui Program La-Da BKAD
3.	Estimasi Aset Tetap Potensial Idle	5.167.600.000.000	96,23%	Belum termanfaatkan/bersertifikat
4.	Realisasi Penjualan Aset Tidak Dipisahkan (2022)	10.590.000.000	0,20%	Berdasarkan LRA 2022
5.	Realisasi Penjualan Aset Tidak Dipisahkan (2023)	9.190.000.000	0,17%	Berdasarkan LRA 2023

Sumber: Diolah oleh peneliti, dari Laporan Neraca 2023 Kabupaten Indramayu, LRA 2022–2023, dan data Program La-Da BKAD 2021–2023.

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, diketahui bahwa total nilai aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Indramayu per akhir tahun 2023 mencapai sebesar Rp5,37 triliun. Namun, dari total aset tersebut, aset yang telah berhasil disertifikatkan melalui program La-Da dalam kurun waktu tiga tahun terakhir baru mencapai Rp202,4 miliar atau sekitar 3,77% dari total aset tetap yang ada.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 96,23% atau sebesar Rp5,17 triliun nilai aset tetap yang berpotensi *idle*, belum bersertifikat, atau belum termanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Selanjutnya, jika dilihat dari realisasi hasil penjualan aset tidak dipisahkan dalam dua tahun terakhir berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), realisasi pendapatan dari hasil penjualan aset hanya mencapai Rp10,59 miliar pada tahun 2022 dan Rp9,19 miliar pada tahun 2023. Nilai ini masih relatif kecil dibandingkan dengan total nilai aset tetap yang dimiliki daerah, serta belum mampu mengurangi proporsi aset *idle* secara signifikan. Hal ini mempertegas bahwa persoalan aset *idle* masih menjadi tantangan serius yang perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah-

Namun, meskipun memiliki regulasi yang jelas, tetapi realita di lapangan menunjukan bahwa kabupaten Indramayu masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan aset daerah. Banyak aset milik pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan cenderung menjadi aset *idle* yang artinya, aset tersebut tidak digunakan atau tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang maksimal. Salah satu contoh dari aset yang terbengkalai adalah Gedung Iptek Sciene Mutiara Bangsa di Kawasan Wisata Bojongsari, Kabupaten Indramayu. Berdasarkan Artikel dari *Detik.com* (2023) terkait “Upaya Pemkab Indramayu untuk mengembalikan fungsi gedung IPTEK Mutiara Bangsa sebagai pusat

inovasi dan teknologi” membahas terkait gedung tersebut mengalami kerusakan fisik dan tidak lagi beroperasi sejak pandemi COVID-19, bisa dilihat pada **Lampiran 8**. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sebenarnya telah menyatakan komitmennya untuk merevitalisasi dan mengembalikan fungsi gedung tersebut agar menjadi aset milik daerah yang potensial sebagai tempat wisata edukasi untuk masyarakat.

Selain itu, di kawasan Wisata Bojongsari juga terdapat *Waterboom* Bojongsari yang juga milik pemerintah daerah yang tutup sejak 2019, Berdasarkan Artikel *TribunJabar.id* (2023) yang membahas terkait *Waterboom* Bojongsari, menyatakan bahwa Objek wisata tersebut kini mengalami kondisi yang memprihatinkan. Dulunya, tempat ini ramai dikunjungi wisatawan karena menawarkan berbagai wahana air yang menarik. Namun, saat ini, area tersebut tampak seperti hutan belantara dengan kolam yang dipenuhi air keruh dan ditumbuhi tanaman liar, dapat dilihat pada **Lampiran 9 dan 10**. Masyarakat setempat mengungkapkan kekecewaan atas nasib *waterboom* yang pernah menjadi primadona wisata, dan berharap ada upaya dari pemerintah atau pihak swasta untuk menghidupkan kembali tempat tersebut agar dapat berfungsi dengan baik dan menarik pengunjung.

Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sebenarnya telah menyatakan komitmennya untuk merevitalisasi dan mengembalikan fungsi gedung tersebut agar dapat dimanfaatkan kembali bagi masyarakat. Akan

tetapi, fakta di lapangan hingga saat ini menunjukkan bahwa upaya revitalisasi tersebut belum direalisasikan. Kondisi terbengkalai ini menimbulkan kerugian non-material berupa citra negatif kawasan wisata, sekaligus kerugian material karena aset daerah yang seharusnya dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi tidak produktif.

Permasalahan ini menggambarkan lemahnya pengelolaan aset daerah yang tidak efektif, khususnya dalam hal pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan aset pemerintah daerah di Kabupaten Indramayu. Lemahnya sistem pencatatan dan pengawasan, serta minimnya inovasi dalam pengelolaan aset, terutama dalam menggandeng pihak ketiga seperti investor swasta melalui skema kerja sama pemanfaatan aset sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, tetapi hingga saat ini belum tercapai kesepakatan kerja sama atau kontrak antara pemerintah daerah dan pihak swasta untuk pemanfaatan aset daerah, bangunan atau gedung, maupun beberapa objek wisata milik pemerintah daerah.

Situasi ini semakin menunjukkan permasalahan dalam pengelolaan aset daerah, khususnya pada aspek pencatatan yang belum sepenuhnya tertib dan akurat. Masih ditemukan sejumlah aset milik pemerintah daerah yang pencatatan datanya belum diperbarui secara rutin dan sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara kondisi fisik aset di lapangan

dengan data administrasi yang tersedia. Kondisi tersebut turut berimbas pada lemahnya fungsi pengawasan, di mana banyak aset daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara produktif justru dibiarkan tidak termanfaatkan atau bahkan mengalami kerusakan tanpa adanya langkah pemeliharaan yang memadai.

Oleh karena itu, upaya perbaikan sistem pencatatan dan pengawasan aset, menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah tidak hanya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga berpotensi menjadi sumber kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan serupa juga telah diangkat dalam beberapa penelitian sebelumnya. Mulyanto,dkk. (2023) menyimpulkan dalam penelitiannya di Kabupaten Puncak menyatakan bahwa inventarisasi dan penilaian aset berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset, sedangkan legal audit hanya berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Penelitian Setyoko dan Ardjunaidi (2020) di Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa pengelolaan aset di kabupaten tersebut masih belum optimal akibat lemahnya koordinasi, pendataan aset yang belum tertib, serta perencanaan pengadaan yang belum berjalan maksimal. Selain itu, dalam penelitian oleh Shara dan Diky Aji (2020) mengidentifikasi lima faktor utama penyebab aset

idle di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sewa, sumber daya manusia, anggaran, legal audit, dan regulasi, serta merekomendasikan peningkatan SDM dan penilaian ulang nilai aset sesuai kondisi aktual.

Selanjutnya, dalam penelitian Lorenzky, Masje,dkk. (2022) memfokuskan kajian pada pengelolaan aset tanah di Kota Bitung yang menunjukkan bahwa proses pengamanan dan pengelolaan aset belum optimal, dan merekomendasikan perlunya peningkatan kerja sama antar instansi dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung. Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada evaluasi pengelolaan aset daerah di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indramayu. Fokus penelitian ini tidak membahas aspek peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan menilai sejauh mana efektivitas pengelolaan aset daerah telah dilaksanakan, mulai dari proses perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, hingga pengawasan aset daerah yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi aktual pengelolaan aset daerah di Kabupaten Indramayu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaannya. Dengan hasil evaluasi tersebut, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola aset daerah agar dapat berjalan lebih optimal, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis Evaluasi pengelolaan aset daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan aset di Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah (Studi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indramayu).”**

B. Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada penjelasan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan aset daerah saat ini di Kabupaten Indramayu?
2. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pencatatan dan pengawasan aset daerah di Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana alur perbaikan prosedur pencatatan dan pengawasan aset daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan aset di Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian untuk :

1. Menganalisis efektivitas pengelolaan aset daerah pada saat ini di Kabupaten Indramayu.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses pencatatan dan pengawasan aset daerah di Kabupaten Indramayu.
3. Merumuskan alur perbaikan prosedur pencatatan dan pengawasan aset daerah guna meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah di Kabupaten Indramayu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengkaji Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah. Penelitian ini akan memberikan kontribusi baik dari segi teoretis maupun praktis. Lebih spesifik dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan wawasan di bidang pengelolaan aset daerah, khususnya terkait *Public Asset Management* (PAM) dan teori *Good Governance*. Teori PAM digunakan untuk menjelaskan tahapan pengelolaan aset daerah mulai dari perencanaan, pencatatan, pemanfaatan, hingga pengawasan agar aset dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, penelitian ini juga memperkuat penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan aset, seperti pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap aturan dalam setiap proses pengelolaan aset pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi referensi bagi pengembangan teori dan penelitian di bidang pengelolaan aset daerah ke depannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten Indramayu dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui strategi pengelolaan aset yang lebih optimal, selain itu Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan aset daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang diharapkan dapat mendorong bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema atau masalah yang sama.